

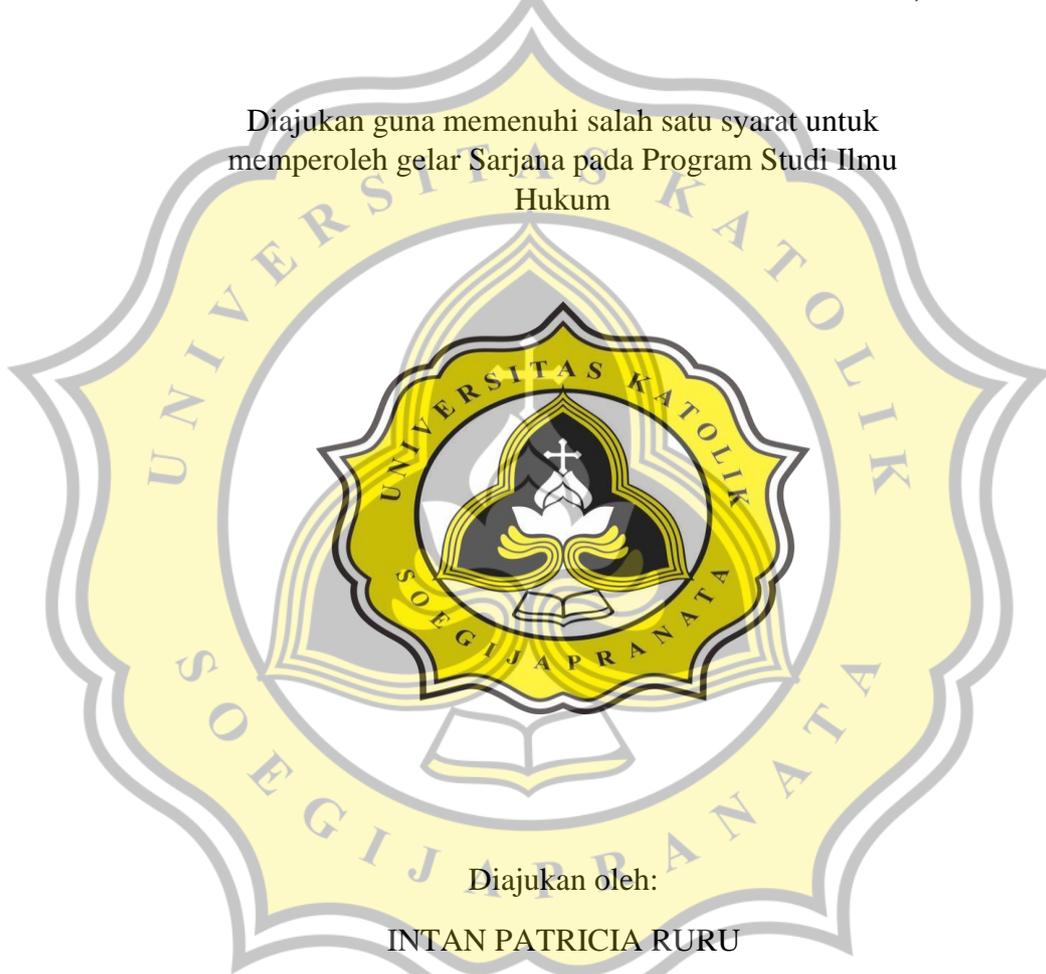
SKRIPSI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (DI POLRES

KOTA MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu
Hukum



Diajukan oleh:

INTAN PATRICIA RURU

NIM : 20.C1.0094

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

SEMARANG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(DI POLRES KOTA MERAUKE PROVINSI PAPUA SELATAN)**

Skripsi:

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu
Hukum

Diajukan oleh:

INTAN PATRICIA RURU

NIM : 20.C1.0094

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Prof. Rika Saraswati, SH, CN, M.Hum, Ph.D

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG 2024

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan masalah serius yang membutuhkan perlindungan hukum yang efektif. Penyebab terjadinya kasus kekerasan sangatlah bervariasi yang bisa dilakukan oleh orangtua, kakak, adik, keluarga lainnya dan tidak menutup kemungkinan dari orang-orang sekitar. Berdasarkan hal-hal tersebut maka rumusan masalah ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Polres Merauke dan 2) Apakah faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dengan adanya interaksi langsung dengan narasumber penelitian. Lokasi penelitian berada di Polres Merauke. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yakni dengan wawancara dan penelitian kepustakaan, serta metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Merauke telah menerapkan pendekatan perlindungan hukum represif dan preventif dalam menangani kasus KDRT. Pendekatan represif mencakup penegakan hukum terhadap pelaku dan penerbitan perintah perlindungan, sementara pendekatan preventif melibatkan program edukasi dan kesadaran masyarakat. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Polres Kota Merauke mengalami beberapa tantangan. Problem utama yang diidentifikasi meliputi penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi efektif antara Polres Merauke dengan lembaga terkait lainnya.

Penelitian ini menyoroti pentingnya penambahan personil di Unit PPA Polres Merauke, peningkatan kesadaran masyarakat, serta koordinasi lintas sektor untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi anak korban KDRT, memberikan penanganan yang holistik dan terpadu. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi anak korban KDRT di Polres Kota Merauke dapat lebih efektif dan efisien, memberikan rasa aman dan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban.

Kata kunci: Perlindungan hukum, anak korban, kekerasan dalam rumah tangga, Polres Kota Merauke.